

ABSTRAK

Pekerjaan di ranah informal menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memenuhi standar untuk bekerja di ranah formal. Sebanyak 59.31% pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal, termasuk pekerjaan sebagai pedagang pasar dan buruh gendong. Akan tetapi, sebagian besar pedagang pasar dan buruh gendong belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan secara formal dari BPJS Ketenagakerjaan. Adanya jaminan sosial yang berasal dari komunitas/kelompok pedagang pasar dan buruh gendong pun menjadi solusi mereka untuk menghadapi risiko kesejahteraan. Namun, mekanisme tersebut cukup terbatas dan tidak mampu mencakup hidup pekerja dalam jangka panjang. Dengan demikian, jaminan sosial ketenagakerjaan secara formal tetap dibutuhkan oleh pedagang pasar dan buruh gendong untuk menghadapi risiko kesejahteraan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis jaminan sosial bagi pedagang pasar dan buruh gendong di Pasar Beringharjo Yogyakarta sebagai sebuah sistem, serta fungsionalitas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyediakan jaminan sosial bagi pekerja informal. Penelitian ini menggunakan teori fungsionalis struktural dengan komponen AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latency*). Informan dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta), Yayasan Annisa Swasti, Paguyuban Pedagang pasar, serta pedagang pasar dan buruh gendong di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan dikombinasikan dengan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan persepsi antara pedagang pasar dan buruh gendong dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Mayoritas pedagang pasar dan buruh gendong di Pasar Beringharjo menganggap pekerjaannya minim risiko. Dengan begitu, mereka lebih mengandalkan BPJS Kesehatan dan komunitas/kelompoknya dalam menghadapi risiko kesejahteraan dan kerentanan akibat pekerjaannya. Perbedaan pandangan tersebut menjadi penyebab ketidakselarasan langkah Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, serta pedagang pasar dan buruh gendong dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Akibatnya, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal pun rendah.

Kata kunci: Pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan, teori fungsionalis struktural, komponen AGIL.

ABSTRACT

Working in the informal sphere is an alternative job for people who do not meet the standards of working in the formal sphere. As many as 59.31% of workers in Indonesia are informal workers, including working as traders and carrying workers. Nevertheless, not all traders and laborers have formal employment social security from BPJS Ketenagakerjaan. The existence of social security that comes from the community/group of traders and buruh gendong is also their solution to facing welfare risks. However, this mechanism is quite limited and unable to cover workers' lives in the long term. Thus, formal employment social security is still needed by traders and carrying workers to deal with welfare risks.

This study aimed to analyze social security for traders and buruh gendong in Pasar Beringharjo Yogyakarta as a system, as well as the functionality of BPJS Ketenagakerjaan in providing social security for informal workers. This study used structural functionalist theory with AGIL components (adaptation, goal attainment, integration, latency). The informants in this study were BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, the Regional Government (Dinas Perdagangan Yogyakarta), the Annisa Swasti Foundation, the Merchant Association, as well as traders and buruh gendong at Beringharjo Market, Yogyakarta. The research was conducted using qualitative methods through in-depth interviews and combined with literature studies.

The results of the study showed that there are differences in perceptions between traders and buruh gendong and BPJS Ketenagakerjaan regarding employment social security. Most traders and buruh gendong in Beringharjo Market have considered their work to be minimal risk. That way, they relied more on BPJS Kesehatan and their communities/groups in dealing with welfare risks and vulnerabilities due to their work. These differences in views have caused the inconsistency of the steps taken by the Government, BPJS Ketenagakerjaan, also traders and buruh gendong to carry them into the employment social security system. As a result, the number of BPJS Ketenagakerjaan members for informal workers was low.

Keywords: *Informal workers, BPJS Ketenagakerjaan, employment social security, structural functionalist theory, AGIL components.*